

Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Likupang

Maykel A. Tampenawas¹, Roslina H.S.D. Limpeleh²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado

Email : maykel.tampenawas@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the socio-economic impacts arising from the development of super priority tourism destination areas in Likupang. This type of research is descriptive qualitative research. The data collection method was carried out by focusing on extracting information about the socio-economic impact of the development of a super priority tourism destination area in Likupang. The approach used in this research is to explore and describe factually the situation and conditions in the field according to applicable scientific norms. The results of this study indicate that the development of a super priority tourism destination area in Likupang has had a positive impact on the socio-economic growth of the people there. This can be seen from the number of activities in the construction of public facilities and facilities as well as the development of human resources.

Keywords: Socio-Economic, Development, Super Priority Tourism Destinations

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak sosial ekonomi yang timbul dari adanya aktivitas pembangunan kawasan destinasi pariwisata super prioritas di Likupang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara memfokuskan penggalian informasi tentang dampak sosial ekonomi pembangunan kawasan destinasi pariwisata super prioritas di Likupang. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggali dan mendeskripsikan secara faktual situasi dan kondisi keadaan di lapangan sesuai norma-norma keilmuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan kawasan destinasi pariwisata super prioritas di Likupang telah membawa dampak yang positif bagi pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat di sana. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan pembangunan fasilitas dan sarana publik serta pengembangan sumber daya manusianya.

Kata-kata Kunci: Sosial Ekonomi, Pembangunan, Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini tengah giat-giatnya melakukan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik pada berbagai aspek kehidupan. Semenjak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kelanjutan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik semakin terasa. Diawali dari gerakan revolusi mental yang menysar seluruh aspek tatanan kerja elit, birokrasi, pemerintahan serta pelayanan pada masyarakat secara umum. Selanjutnya kegiatan pembangunan mulai mengarah pada pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, waduk/bendungan, gedung pemerintahan, fasilitas umum, transportasi laut, darat maupun udara.

Berdasarkan fakta di lapangan, pembangunan fisik dan non-fisik saling berkaitan seperti halnya dalam pembentukan suatu kawasan terpadu. Kawasan terpadu dibuat oleh pemerintah dengan cara menggabungkan beberapa aspek penting di mana salah satunya

yaitu pariwisata. Likupang, sebagai salah satu daerah pariwisata super prioritas (DPSP) yang terpilih saat ini memiliki berbagai aktivitas pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari telah dan sedang dibangunnya berbagai sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara udara, pembangkit listrik, hotel, restoran dan sarana fasilitas penunjang wisata lainnya.

Hal ini membuktikan bahwa perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah sangat serius dalam membangun suatu kawasan terpadu. Biasanya dalam membangun suatu kawasan baru sering dijumpai masalah. Salah satunya yaitu tentang bagaimana dampak sosial ekonomi yang terjadi dalam pembangunan kawasan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Likupang. Untuk itu penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak sosial ekonomi yang timbul dari adanya aktivitas pembangunan kawasan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Likupang.

Dengan adanya proyek nasional berskala besar ini diharapkan nantinya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pembangunan di daerah tersebut. Hal ini antara lain dengan adanya kegiatan pembangunan sarana dan fasilitas infrastruktur, sarana transportasi serta sarana penunjang wisata lainnya.

LANDASAN TEORI

Agar tercapai tujuan dan manfaat, penelitian ini dibuat berdasarkan teori-teori keilmuan yang berlaku. Berikut ini dijelaskan landasan teori dari beberapa istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini seperti:

1. Sosial

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat, di mana dirasa perlu adanya komunikasi antar individu. Dari kata tersebut didapatkan dua arti yaitu yang pertama berkenaan dengan masyarakat dan yang kedua berkenaan dengan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dan sebagainya).
- b. Kata sosial juga berasal dari bahasa Latin, yaitu *socius* yang berarti bersama-sama, bersatu, terikat, sekutu, berteman. Maka dari itu sosial dapat dimengerti sebagai pertemanan atau masyarakat.
- c. Menurut Lawang Robert (2004), pengertian kata sosial adalah arti subjektif yang memperhitungkan perilaku orang lain yang terlibat dalam suatu tindakan. Arti subjektif menunjuk pada arti yang diberikan oleh orang yang bertindak untuk tindakannya sendiri. Sedangkan pengertian konsep sistem sosial merupakan sejumlah kegiatan atau sejumlah yang berhubungan timbal baliknya kurang lebih bersifat konstan.

2. Ekonomi

- a. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* memiliki arti rumah tangga, sedangkan kata *nomos* berarti mengatur. Oleh karena itu istilah ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Namun, rumah tangga pada ekonomi tidak hanya dalam lingkup keluarga akan tetapi bisa berarti ekonomi desa, kota hingga negara.
- b. Definisi ekonomi yang diungkapkan oleh Silk yaitu sebagai ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan dan merupakan suatu bagian yang penting daripada studi tentang manusia. Hal ini disebabkan karena sifat manusia yang telah dibentuk oleh kerjanya sehari-hari, serta sumber-sumber material yang mereka dapatkan.

3. Sosial Ekonomi

- a. Sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.
- b. Menurut Sastropradja (2000), sosial ekonomi adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat sekelilingnya.
- c. Malo Manaso (2001) juga memberikan batasan tentang kondisi sosial ekonomi yang merupakan suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang

pada posisi tertentu dalam sosial masyarakat. Pemberian posisi disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.

4. Konsep Pembangunan

- a. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan.
- b. Menurut Subandi, pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.
- c. Pengertian pembangunan Rochajat.dkk, (2011) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.
- d. Selanjutnya menurut Abdul Halim (2004) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.
- e. Menurut Bachtiar Effendi (2002), pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna, dan hasil guna yang merata dan berkeadilan.
- f. Menurut Nugroho dan Rochimin Dahuri dalam skripsi Richie (2012), pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan menciptakan aspirasinya yang paling manusiawi.
- g. Selanjutnya jika berbicara tentang pembangunan manusia, Zulkarimein (1992) menyebutkan bahwa sesungguhnya yang hendak dibangun adalah manusia.

5. Pariwisata

- a. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dari tempat yang mereka tinggali guna untuk mengunjungi tempat yang lainnya dengan waktu dan tujuan berkunjung.
- b. Menurut ahli ekonomi berkebangsaan Austria, yaitu Schulalard Herman (1910), pariwisata adalah seluruh kegiatan yang memiliki hubungan dengan masuk, tinggal dan pergerakan penduduk asing di dalam ataupun di luar suatu negara, kota atau wilayah tertentu.
- c. Adapun pengertian lain dari pariwisata adalah fenomena atau gejala kemasyarakatan yang menyangkut mengenai manusia, masyarakat, kelompok, organisasi kebudayaan dan lainnya yang merupakan kajian sosiologis.
- d. Secara umum pengertian pariwisata merupakan seluruh kegiatan pemerintah, dunia usaha serta masyarakat guna mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan.

6. Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)

Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kawasan atau area yang mendapat perhatian paling utama di bidang pariwisata.

7. Likupang

Jika menyebut destinasi pariwisata favorit yang ada di Sulawesi Utara mungkin nama Manado dan Bunaken yang akan sering muncul. Sementara nama Likupang mungkin masih sangat jarang diketahui banyak wisatawan. Namun demikian, letak Likupang yang berada di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi wisata yang luar biasa indah dan pastinya tak kalah dari Manado maupun Bunaken.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif lebih memfokuskan untuk menggali informasi tentang dampak sosial ekonomi pembangunan kawasan destinasi pariwisata super prioritas di Likupang. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggali dan mendeskripsikan secara faktual situasi dan kondisi keadaan di lapangan sesuai norma-norma keilmuan yang berlaku.

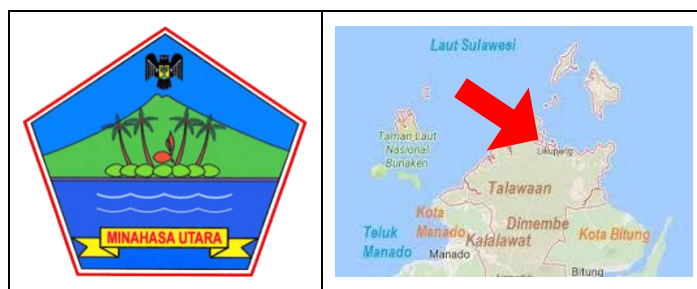
Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri, yang melakukan pengumpulan data di lapangan (dokumentasi) dan pengumpulan informasi dari sumber-sumber dan referensi yang relevan di lapangan terkait dengan penelitian. Data-data berupa data primer dan sekunder yang didapat dikumpul, disaring dan disajikan sesuai dengan keabsahannya. Semua data dan informasi diperoleh melalui metode survey dan observasi langsung ke lapangan serta studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan langsung di lapangan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pengumpulan data. Selain itu studi kepustakaan juga dipakai dalam penelitian ini sebagai bahan referensi.

Hasil observasi lapangan nantinya digunakan untuk mendeskripsikan kondisi keadaan di lapangan terkait dengan adanya pembangunan kawasan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Likupang. Sementara data-data hasil wawancara langsung dan tidak langsung dipakai untuk menyimpulkan temuan-temuan yang didapat dalam penelitian sesuai dengan aturan-aturan keilmuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas pada tahun 2019 lalu nama Likupang semakin lama semakin dikenal oleh wisatawan domestik sebagai tempat berbagai jenis wisata alam yang bisa dikunjungi antara lain wisata pantai, pemandangan bawah laut, bukit savana, hutan bakau dan berbagai alternatif destinasi wisata lainnya. Menurut sejarahnya, dahulu oleh penduduk setempat menyebut Likupang dengan sebutan "*Linekepan*" yang berasal dari bahasa Tounsea yaitu "*Linekep*" yang artinya "*tenggelam*". Istilah Linekepan yang berarti tenggelam ini ditetapkan oleh pendiri daerah ini yang disebut dengan istilah "*dotu-dotu*" berdasarkan kondisi saat itu.

Terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, secara administratif Likupang merupakan bagian dari Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai wilayah yang berbukit dan terletak di pesisir pantai yang sebagian berpasir putih, Likupang memiliki area lahan keseluruhan seluas 406,95 km² yang terdiri dari Likupang Barat seluas 104,29 km², Likupang Timur seluas 290,84 km² dan Likupang Selatan seluas 11,82 km².



Gambar 1. Peta Wilayah Kota Manado

Saat ini Likupang telah berkembang dari yang semula hanya satu kecamatan namun kini memiliki tiga kecamatan yaitu Kecamatan Likupang Barat dengan ibukota kecamatannya di Desa Serey, Kecamatan Likupang Timur dengan ibukota kecamatannya di Desa Likupang Satu dan Kecamatan Likupang Selatan dengan ibukota kecamatannya di Desa Kokoleh satu. Untuk rencana ke depan nantinya wilayah Likupang diusulkan akan menambah dua kecamatan lagi yaitu Kecamatan Likupang Induk atau Likupang Tengah

dan Kecamatan Likupang Kepulauan. Hal ini dilakukan dalam rangka rencana persiapan pemekaran Likupang menjadi Kabupaten atau Kota Likupang Raya. Pada setiap kecamatan yang ada di Likupang masih terdiri dari beberapa desa. Untuk Kecamatan Likupang Barat terdapat 20 desa, Likupang Timur 18 desa dan Likupang Selatan sebanyak 7 desa.

Jumlah penduduk yang terdapat pada ketiga kecamatan di Likupang menurut data yang ada terus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Minahasa Utara (2022), jumlah penduduk pada ketiga kecamatan di Likupang pada tahun 2021 sebanyak 44.358 jiwa di mana jumlah penduduk di Likupang Barat sebanyak 17.964 jiwa (40,50%), Likupang Timur sebanyak 20.578 jiwa (46,39%) dan Likupang Selatan sebanyak 5.816 jiwa (13,11%). Sementara untuk tingkat penyebaran penduduk berdasarkan data yang didapat menunjukkan bahwa rata-rata tingkat penyebaran penduduk per km² di Likupang (2021) sebanyak 120,69 per km² yang terdiri dari Kecamatan Likupang Barat yaitu sebanyak 84,23 per km², Kecamatan Likupang Timur sebanyak 34,43 km² dan Kecamatan Likupang Selatan sebanyak 243,40 km². Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Likupang Selatan adalah yang terendah namun dari segi tingkat kepadatan penduduk per km² di Kecamatan Likupang Selatan adalah yang terbesar dibanding dengan dua kecamatan lainnya.

Sebagai wilayah yang memiliki area terluas di Kabupaten Minahasa Utara, Likupang memiliki beberapa potensi yang dapat diandalkan. Potensi tersebut di antaranya berasal dari sumber-sumber kekayaan alam berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Selain itu Likupang juga memiliki potensi andalan yang baru yakni sektor pariwisata yang mulai giat dikembangkan setelah ditetapkan sebagai salah satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Indonesia.



Gambar 2. Lima DPSP di Indonesia

Dalam mempromosikan pariwisatanya, Likupang sangat mengandalkan unsur keindahan alam yang dimiliki seperti pantai yang eksotis, panorama keindahan alam bawah laut, pemandangan bukit savana, hutan bakau (*mangrove*), cagar alam, cagar budaya serta obyek-obyek wisata menarik lainnya. Adapun destinasi wisata yang diandalkan antara lain Pantai Likupang (*Likupang Beach*), Pantai dan Bukit Pulisan, Bukit Larata dan Pantai Kinunang, Pantai Paal, Pulau Lihaga, Pulau Gangga serta Ekowisata Desa Bahoi. Namun sebelum ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas, Likupang telah lebih dulu ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia karena memiliki potensi yang besar di sektor pariwisata. Melansir laman resmi Dewan Nasional KEK-RI, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas tertentu di Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Tujuan utama dari pengembangan KEK adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa.

Untuk membangun kawasan wisata super prioritas tentunya dibutuhkan pula kesiapan yang matang seperti penyediaan perangkat aturan baik oleh pusat maupun

daerah yang nantinya akan digunakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan operasional, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan hingga kesiapan faktor finansial. Berbagai kebutuhan perlu diadakan di mana salah satu di antaranya yaitu ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana wisata. Adapun fasilitas sarana dan prasarana wisata yang sudah dan masih sementara dibangun di kawasan DPSP Likupang di antaranya adalah fasilitas infrastruktur, akomodasi/penginapan (*hotel, resort, villa, cottage, homestay*), restoran, tempat hiburan/rekreasi, agen wisata serta fasilitas dan sarana penunjang wisata lainnya.



Gambar 3. Infrastruktur Wisata di Likupang

Keberadaan Likupang yang disiapkan sebagai salah satu kawasan DPSP di Indonesia diperkirakan akan membawa pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Dalam kehidupan manusia terdapat empat faktor yang mempengaruhi status sosial ekonomi seseorang di masyarakat di mana faktor-faktor tersebut di antaranya yaitu pendidikan, pekerjaan atau mata pencaharian, penghasilan atau pendapatan dan kedudukan sosial. Hal tersebut mulai tampak di tengah kehidupan masyarakat Likupang saat ini.

Pengembangan wisata suatu daerah selalu ada dua sisi mata uang, ada positif dan negatif. Di satu sisi meningkatkan pendapatan daerah dan devisa negara, tetapi sisi lain ada dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Untuk itu maka dilakukanlah langkah-langkah seperti pelestarian lingkungan, pengendalian sampah serta penguatan sektor informal. Meskipun antisipasi telah dilakukan namun proses pembangunan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) seringkali menemui kendala dan hambatan dalam pelaksanaan. Mengutip pernyataan ketua umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Arsjad Rasjid, kendala besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembangunan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) berasal dari eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, terkait kondisi hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan China serta persoalan pandemi covid-19 yang belum usai. Sementara di sisi internal yaitu terjadinya perubahan kebijakan akibat adanya pergantian kepemimpinan serta minimnya sarana infrastruktur penunjang investasi.

Kendala yang terjadi di Likupang yaitu dalam hal pembebasan lahan untuk membangun sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan. Contohnya yaitu ketika pemerintah akan membangun jalan Tol Manado-Bitung, perluasan areal bandara Sam Ratulangi serta yang masih bermasalah hingga kini yaitu proyek pembangunan hotel bertaraf internasional *Likupang Eco Family Hotel & Resort*. Masalah lain yaitu masih minimnya sarana penunjang wisata yang memadai. Contohnya seperti masih banyak dijumpai rumah-rumah makan yang berada cukup dekat dari bibir pantai. Hal ini tentunya beresiko bagi keselamatan pengunjung dan juga pemilik usaha. Selain keamanan, faktor penting lainnya yaitu kenyamanan dan kebersihan lingkungan tempat obyek wisata tersebut berada. Dalam hal ini yang ditemui di lapangan yaitu masih minimnya penyediaan fasilitas tempat bilas dan toilet yang bersih bagi para pengunjung jika ingin berenang dan berwisata di tempat-tempat obyek wisata pantai yang ada.

Mengatasi kendala-kendala tersebut pemerintah telah menyodorkan sejumlah solusi meski tidak semuanya dapat terealisasi secara bersamaan dalam waktu dekat. Salah

satunya yaitu melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau *Omnibus Law* di mana UU tersebut mengakomodir kebutuhan investor dalam hal efisiensi. Solusi lainnya yakni mengoptimalkan *Online Single Submission (OSS)* sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota yang dilakukan secara elektronik. Selain itu tidak ketinggalan pula terkait suksesi penanganan covid-19 di dalam negeri, konsistensi RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nasional serta produksi yang berorientasi ekspor. Di samping itu harus dipikirkan pula bagaimana mengunci *long term planning* untuk Indonesia di mana era kepemimpinan boleh berubah tapi perencanaan ke depan tetap harus bisa berjalan. Terakhir, yakni dengan memanfaatkan momentum *decoupling* antara AS dan China. Khusus untuk Likupang, perhatian yang diberikan mulai dari pemerintah pusat dalam hal ini oleh Presiden Joko Widodo hingga pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

KESIMPULAN

Setelah melalui beberapa tahapan penelitian yang telah dilakukan akhirnya penelitian ini sampai pada tahapan kesimpulan yaitu: *Pertama*, Likupang telah dijadikan sebagai 5 Destinasi Super Prioritas yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional 2020-2024. *Kedua*, Likupang juga ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang. *Ketiga*, Pengembangan pariwisata di Likupang tidak lepas dari pengembangan pariwisata lainnya yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi Manado (Bunaken), Bitung (Lembeh), Tomohon dan Tondano. *Keempat*, Pembangunan kawasan wisata super prioritas di Likupang meliputi: Infrastruktur yang meliputi pembangunan dan perluasan *runway* Bandara Sam Ratulangi, pelabuhan laut, penyeberangan antar pulau, peningkatan terminal transportasi darat, peningkatan dan pelebaran ruas jalan serta perbaikan jembatan penyeberangan; Pembangunan fasilitas akomodasi (penginapan) seperti Sarhunta (Sarana Hunian Pariwisata) yaitu rumah-rumah warga yang direnovasi dan direhabilitasi serta dimanfaatkan sebagai sarana pondok wisata (*homestay*) hingga pembangunan hotel bertaraf internasional; Pembangunan sarana penunjang wisata lainnya seperti pembuatan sumber energi listrik tenaga matahari oleh pihak swasta guna menopang ketersediaan energi listrik yang sudah ada yaitu PLN (Perusahaan Listrik Negara). Selain itu, keterlibatan dari investor dan pelaku-pelaku usaha wisata dalam membangun suatu kawasan wisata khususnya di Likupang terbuka lebar dengan catatan sanggup memenuhi segala ketentuan dan norma-norma yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. (2004). *Membangun Desa Partisipatif* Jakarta: PT Bumi Aksya.
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR. 2020. *SINERGI*. Edisi 44 | Januari - Februari 2020
- Bachtiar, Effendi. (2002). *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Kurnia Kalam Semesta, Uhaindo Media dan Offset: Yogyakarta
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta. Uhaindo dan Offset.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Kecamatan Likupang Barat Dalam Angka. (2021). *Likupang Barat District In Figures*. BPS Kecamatan Likupang Selatan Dalam Angka. (2022). *Likupang Selatan District In Figures*. BPS Kecamatan Likupang Timur Dalam Angka. 2021. *Likupang Selatan District In Figures*. BPS
- Lawang Robert. (2004). *Sistem Sosial Indonesia*. Universitas Terbuka.
- Malo Manaso. (2001). *Kedudukan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun (2019) tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Likupang

- Richie, 2012. Studi Tentang Pelaksanaan Program CSR Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kampung Muara Tae dan Kampung Muara Nayan Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. Tesis Tidak Diterbitkan. Fisipol-Unmul: Samarinda.
- Rochajat dan Elvinaro Ardianto. (2011). Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sastropradja. (2000). *Status Sosial Masyarakat*. Jakarta: Karya Pustaka
- Schulalard Herman. (1910) pengertian pariwisata. [http://repository.usu.ac./bitstream/123456789/17052/3/C hapter%2011.pdf](http://repository.usu.ac./bitstream/123456789/17052/3/C%20chapter%2011.pdf)
- Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Minahasa Utara. (2021). BPS Kabupaten Minahasa Utara. Katalog: 4101002.7106.
- Zulkarimein. (1992). Komunikasi Pembangunan. Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta: Rajawali.